

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2022**



UIJ
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM EKONOMI ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD MUFLIHUDDIN

NIM. 19108010049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN JUDUL
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2022



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM EKONOMI ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD MUFLIHUDDIN

NIM. 19108010049

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL QOYUM, S.E.I., M.Sc.Fin

NIP. 19850630 201503 1 007

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1840/Un.02/DEB/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUFLIHUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 19108010049
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

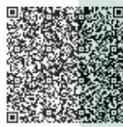
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin.
SIGNED

Valid ID: 657f9a7ca0308



Penguji I
Dr. Sunaryati, SE., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65827872087cd



Penguji II
Anggari Marya Kresnowati, S.E. M.E.
SIGNED

Valid ID: 658520ae64118



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65852ef0ed5c7

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Muflihuddin
Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di - Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Muflihuddin
NIM : 19108010049
Judul Skripsi : "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2022"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 November 2023

Pembimbing



Dr. Abdul Qovum S.E.I., M.Sc.Fin

NIP. 19850630 201503 1 007

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muflihuddin

NIM : 19108010049

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2022**” adalah benar-benar merupakan penyusunan hasil karya sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terjadi penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Yogyakarta, 28 November 2023

Hormat Penyusun


METERAL TEMPEL
51AKX775500671

(Muhammad Muflihuddin)

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Sebagai Civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muflihuddin
NIM : 19108010049
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2022”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 28 November 2023

Hormat Penyusun



Muhammad Muflihuddin

NIM. 19108010049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

“Dunia sementara, akhirat selamanya”



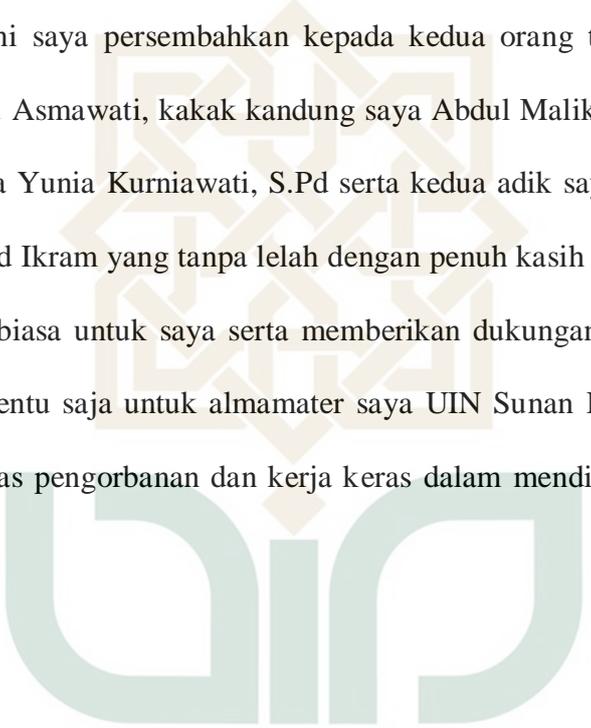
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, Rahmat dan keberkahannya kepada saya, sehingga saya sampai pada titik ini untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Drs. Anshar dan Ibu Asmawati, kakak kandung saya Abdul Malik Nasrullah, S.Pd dan kakak ipar saya Yunia Kurniawati, S.Pd serta kedua adik saya Nurhafida Anshar dan Muhammad Ikram yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan doa yang luar biasa untuk saya serta memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Dan tentu saja untuk almamater saya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik saya sampai saat ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Sa ^ʿ	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa''	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>Mutaáddidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbuttah

Semua *ta'marbuttah* ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata

sandang “al”). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>Jizyah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----	fathah	Ditulis	<i>A</i>
-----	kasrah	Ditulis	<i>I</i>
-----	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

فَعَلَ	fathah	Ditulis	<i>Faála</i>
ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis	<i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهليّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4. Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فرض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakuma</i>
2. Fatḥah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dan Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdzwaiza, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Dr. Sunaryati, M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Lailatis Syarifah, Lc., M.A. . selaku Dosen Pembimbing Skripsi selama proses pembuatan proposal hingga diseminarkan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan yang sangat luas selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Pegawai Staf Tata Usaha Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Drs. Anshar dan Ibu Asmawati yang sabar dan tulus ikhlas telah membesarkan saya dengan penuh kasih

sayang, selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doá terbaiknya. Beserta kakak kandung saya Abdul Malik Nasrullah, S.Pd dan kakak ipar saya Yunia Kurniawati, S.Pd serta kedua adik saya Nurhafida Anshar dan Muhammad Ikram yang selalu memberi dukungan baik dalam bentuk moral maupun materiil.

9. Keluarga besar IMM FEBI yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga.
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
11. Seluruh mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah menjadi teman berjuang selama masa perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkah dan sempurna. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran serta perkembangan penelitian ini sangat di harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 28 November 2023

Hormat Penyusun



(Muhammad Muflihuddin)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
HALAMAN PERSETUJUAN.....	4
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	5
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	6
HALAMAN MOTTO	7
HALAMAN PERSEMBAHAN	8
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	9
KATA PENGANTAR.....	14
DAFTAR ISI	16
DAFTAR TABEL.....	18
DAFTAR GAMBAR	19
ABSTRAK	20
ABSTRACT	21
BAB I.....	22
PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang	22
B. Rumusan Masalah	33
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	33
D. Sistematika Pembahasan	35
BAB II	37
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	37
A. Landasan Teori.....	37
1. Teori <i>Welfare State</i>	37
2. Kesejahteraan Masyarakat	38
3. Pendapatan Asli Daerah	45
4. Dana Alokasi Umum.....	50
5. Dana Alokasi Khusus	53
B. Telaah Pustaka	56

C. Kerangka Konseptual.....	66
D. Pengembangan Hipotesis.....	67
BAB III.....	73
METODOLOGI PENELITIAN	73
A. Jenis Penelitian	73
B. Definisi Operasional Variabel	73
C. Populasi dan Sampel.....	75
D. Jenis dan Sumber Data.....	75
E. Metode Analisis	76
BAB IV	83
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	83
A. Analisis Data Penelitian.....	83
1. Analisis Deskriptif Statistik.....	83
2. Uji Asumsi Klasik	86
3. Uji Hipotesis	92
B. Pembahasan	98
BAB V.....	108
PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2013 2022.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel	50
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik	58
Tabel 4.2 Output Uji Normalitas Kolomogrov – Smirnov Test	62
Tabel 4.3 Output Uji Multikolinieritas.....	64
Tabel 4.4 Output Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson	66
Tabel 4.5 Output Analisis Linier Berganda	67
Tabel 4.6 Outout Uji T.....	69
Tabel 4.7 Output Uji F	71
Tabel 4.8 Output Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	44
Gambar 1.2 Gambar Grafik Uji Normalitas P-P Plot.....	63
Gambar 2.2 Grafik Uji Heteroskedastisitas Scatterplot	65



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kesejahteraan Masyarakat



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local revenue, general allocation funds, and special allocation funds on community welfare. The sample used in this research is all regencies / cities in the Special Region of Yogyakarta Province in 2016-2022. This research uses secondary data. This research was analyzed using multiple linear regression analysis methods. The results of statistical testing show that local revenue has a significant effect on community welfare, general allocation funds have a significant negative effect on community welfare, and special allocation funds have no effect on community welfare. The independent variables in this study simultaneously have a significant effect on community welfare.

Keywords: Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Community Welfare



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di daerahnya penting untuk ditingkatkan. Banyak ditemukan di Indonesia masyarakat yang belum sejahtera. Pada faktanya Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Apabila dikelola dengan baik seharusnya sumber daya alam tersebut cukup untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dijelaskan pada UU No. 11 Tahun 2009 bahwa kesejahteraan ialah suatu keadaan dimana saat tercukupinya semua kebutuhan spiritual, material dan juga sosial masyarakat untuk hidup layak dan dapat melakukan pengembangan diri sehingga mampu melaksanakan aktifitas sosialnya dengan baik. Untuk melihat kesejahteraan sosial dilihat dari adanya kualitas pendidikan yang baik secara merata, pendapatan yang merata, serta peningkatan kualitas kesehatan. (Suharto, 2009).

Pada faktanya kesejahteraan di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Data pada hasil laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 2020 menunjukkan Indonesia masih berada di peringkat menengah apabila dibandingkan dengan pencapaian yang ada pada beberapa negara maju contohnya usia

harapan hidup pada negara Hongkong mencapai 84,9 persen/tahun. Sedangkan negara Jepang mencapai 84,6 persen/pertahun dan Swis mencapai 83,8 persen. Sedangkan indonesia angka harapan hidupnya mencapai 71,7 persen/pertahun. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Data diatas seharusnya menjadi tolak ukur pemerintah untuk lebih giat lagi dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut *United Nation for Development Programme* (UNDP) dalam Wijayanti & Darsana, (2015) keberlangsungan kesejahteraan masyarakat seharusnya diawasi oleh pemerintah sehingga pemerintah mengetahui dan dapat melakukan pembenahan pada bagian komponen penunjang kesejahteraan masyarakat yang perlu diperbaiki.

Pemerintah suatu daerah dalam mengawasi keberlangsungan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dapat melihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada daerahnya. *United Nations Development Programme* (UNDP) mencetuskan konsep pembangunan manusia yang berfungsi untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu daerah. Menurut Hasan & Agung, (2018) IPM merupakan alat ukur yang dimanfaatkan untuk mengetahui kualitas pembangunan manusia dengan mengukur dari angka harapan hidupnya, angka melek hurufnya, berapa jumlah rata-rata pengeluaran perkapitanya, dan rata-rata lama sekolah.

Berdasarkan data badan pusat statistik nilai IPM Kabupaten/Kota tertinggi di Indonesia di tempati oleh Kota Yogyakarta. Pada faktanya,

capaian ini masih mengalami pertimpangan nilai IPM antara kota Yogyakarta dengan kabupaten DIY lainnya. IPM Kota Yogyakarta merupakan capaian paling tinggi diantara kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dengan menyentuh angka 87,69 persen/pertahun. Capaian IPM Kabupaten Sleman pada angka 84,31 persen/pertahun. Pada kabupaten Bantul mencapai angka 80,69 persen/pertahun. Untuk IPM pada Kulon Progo 75,46 persen/pertahun. Dan untuk Gunung Kidul mencapai angka 70,96 persen/pertahun. Perbedaan nilai diantara IPM Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunungkidul dengan nilai gap sebesar 16,73 poin, yang mengartikan bahwa telah terjadinya ketimpangan pembangunan manusia pada Provinsi D.I. Yogyakarta (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tabel 1. 1 IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2016-2022

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)	74,71	74,74	74,82	74,92	74,99	75,04	75,08
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,23	15,42	15,56	15,58	15,59	15,64	15,65
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,12	9,19	9,32	9,38	9,55	9,64	9,75
IPM	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97	79,97	80,64

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta

Data Badan Pusat Statistik, (2022) diatas pada tahun 2016, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir di D.I. Yogyakarta adalah 74,71 persen/pertahun terus meningkat mencapai 75,08 persen/pertahun pada tahun 2022. Selama periode 2016 hingga 2022. Pertumbuhan UHH per tahun rata-rata bertambah sebesar 0,07. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh 0,07 persen, pada tahun 2022 terjadi perlambatan dengan hanya bertambah 0,04 persen/pertahun atau hanya bertumbuh 0,05 persen. Pada data diatas dapat kita ketahui bahwa selama periode 2016 hingga 2022, pertumbuhan UHH di Yogyakarta mengalami perlambatan di setiap tahunnya.

Sejak tahun 2016, IPM DIY bertambah sebesar 2,26 poin dari 78,38 pada tahun 2016 menjadi 80,64 pada tahun 2022 rata-rata tumbuh 0,45 persen/tahun. Jika dibandingkan dengan IPM Indonesia pertumbuhan IPM Provinsi Yogyakarta ini masih dibawah nasional yang pada periode 2016-2022 bertambah sebesar 2,26 poin yang rata-rata tumbuh 0,45 persen/tahun (Badan Pusat Statistik, 2022). Menurut Putra & Ulupui, (2015) dalam upaya memperbaiki nilai IPM tidak cukup jika hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengembangan dari segala sisi. Untuk upaya membuat pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia sarah, diperlukan adanya pemerataan pembangunan. Apabila dilakukan pembangunan yang merata maka dapat menjamin masyarakat secara

menyeluruh berdampak atas pembangunan sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama yang diupayakan oleh setiap daerah tidak terkecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai usaha direncanakan dan juga dilakukan pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerahnya sehingga diharapkan mampu berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat daerahnya. Menurut Melgiana *et al.*(2020) dengan berhasilnya pemerintah terkait tata kelolanya, diharapkan di iringi dengan keberhasilan daerah terhadap pengelolaan kekayaan daerah dan sehingga hasil dari pengelolaan kekayaan daerah secara optimal tersebut mampu mencukupi semua kebutuhan masyarakatnya, seperti kebutuhan kesehatan, pendapatan, dan kebutuhan pendidikan yang akhirnya mampu membangun masyarakat yang berkualitas untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan peran pemerintah agar dilaksanakannya pembangunan. Dimana Pembangunan tersebut adalah bagian dari terlaksanakannya otonomi daerah. Hal tersebut sejalan dengan Teori *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) yang mengungkapkan gagasan bahwasanya suatu Pemerintahan atau Negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab secara utuh terhadap penyediaan segala kebutuhan yang ada pada masyarakatnya. Tanggungjawab ini hanya ada pada pemerintah dan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain. (Astuti & Astika, 2016)

Otonomi daerah sendiri pada dasarnya merupakan pemberian hak serta wewenang dan kewajiban dalam rangka pengaturan daerahnya sendiri dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta prinsip dalam otonomi daerah. Menurut Nugraheni (2022) dilaksanakannya otonomi daerah akan didanai dengan pendapatan daerah setempat yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan hasil pendapatan lainya dari daerah tersebut.

Dimulainya otonomi daerah dengan berlakunya ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 terkait Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 terkait Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut kemudian telah diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Berdasarkan Undang-Undang tersebut tujuan dari diberikanya hak otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi dan kewenangan daerahnya dalam mengelola sumber daya yang ada pada daerah setempat secara optimal sehingga keuangan daerah akan mengalami peningkatan dalam kinerjanya.

Kebijakan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk Pemerintahan Daerah (Nuarisa, 2013).

Adanya perlambatan dalam pertumbuhan pembangunan manusia di Yogyakarta sudah seharusnya menjadi persoalan yang dibenahi pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah pusat mengatur Otonomi Daerah untuk memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pengurangan terjadinya kesenjangan antara daerah. (Rohmah, 2017). Menurut Astuti & Astika, (2016) dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang optimal, harus disertai dengan dana daerah yang memadai. Dalam Upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat, maka memerlukan sumber pembiayaan.

Sumber pendapatan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 serta UU No. 33 tahun 2004 Pasal 5, telah ditetapkan sumber pendapatan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (DAU & DAK), pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber keuangan utama daerah yang selalu diandalkan diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah. Adanya pendapatan asli daerah ini juga sangat mempengaruhi bagaimana berjalanya tugas-tugas pemerintahan daerah sehingga bisa terselesaikan dan berjalan dengan baik. Selain itu juga berdampak pada kurangnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Didasarkan pada hal

tersebut pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah agar dapat mengelola potensi daerahnya sebagai penunjang pendapatan asli daerah (Purba & Ginting, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dianggap masih rendah apabila dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang diterima daerah. Adanya situasi seperti ini menyadarkan pemerintah daerah bahwa perlu adanya upaya untuk menemukan potensi keuangan daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. Potensi keuangan yang dapat diperoleh daerah selain dari pajak adalah adanya dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang diberikan kepada daerah yang berasal dari pusat atau APBN yang pengalokasiannya bertujuan sebagai pembiayaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 32 Tahun (2004) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus adalah dana perimbangan yang mana didalam pelaksanaan pengalokasiannya mengharuskan terlaksana dengan adil dan merata serta sesuai dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sumber keuangan daerah tersebut harus dimaksimalkan dan juga dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat yang mana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah untuk meratakan kesanggupan dari keuangan

daerah dalam rangka mendanai berbagai kebutuhan untuk melaksanakan desentralisasi. Menurut pengertian dan tujuannya, dapat diartikan bahwa pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada daerah dimana dana tersebut akan dipergunakan untuk pemberian layanan publik yang lebih baik. Layanan publik yang lebih baik ini nantinya akan membawa peningkatan dalam beberapa hal penting antara lain, pendidikan, standar kehidupan, kesehatan, serta harapan hidup yang lebih panjang. (Williantara & Budiasih, 2016).

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di berikan kepada daerah berfungsi sebagai pembiayaan kebutuhan daerah yang bersifat khusus yang mana juga menjadi prioritas nasional dengan penyesuaian ketersediaan APBN. Diantara salah satu tujuan Dana Alokasi Khusus adalah agar dapat mencukupi beban pembiayaan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang belum sesuai dengan standar serta mampu menunjang pembangunan daerah agar terlaksana dengan cepat. (Firdaus, 2019). Penetapan 3 kriteria Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah yang mana berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 pasal 40 dan UU No. 33 tahun 2004 yang terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ini ditetapkan berdasarkan pada bagaimana kemampuan keuangan daerah tersebut pada APBD. Kriteria khusus dipertimbangkan berdasar pada undang-undang serta karakteristik

daerah tersebut, dan untuk kriteria teknis ini ditetapkan melalui kementerian negara atau departemen teknis (Riviando *et al.*, 2019).

Harapan terhadap peran dari Pemerintah daerah akan tetap ada agar mampu mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten/Kota yang nantinya Pendapatan Asli Daerah akan terus menunjukkan tren positif dan juga mampu memaksimalkan pemanfaatan dana perimbangan yang diperoleh dari APBN. Adanya penerimaan daerah dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang lain juga diharapkan secara serempak mampu dalam menunjang pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdapat beberapa penelitian serupa yang pelaksanaan penelitiannya berada di wilayah yang berbeda. Wijayanti & Darsana,(2015) melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan kepada pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan kepada kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Rosita & Sutrisna, (2018) memaparkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yaitu signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dana perimbangan memiliki

pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian, Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan juga pertumbuhan ekonomi dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan. Penelitian diatas sama-sama menghasilkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat hasilnya berbeda sedangkan dana perimbangan menunjukkan hasil yang sama. Berdasarkan hasil diatas peneliti tertarik untuk mengkaji ulang menggunakan variabel yang serupa akan tetapi wilayah penelitiannya berbeda.

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya diwujudkan berdasarkan penelitian sebelumnya dengan wilayah penelitian yang berbeda dan waktu yang berbeda. Lokasi dalam penelitian ini adalah pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jangka waktu penelitian 7 tahun yaitu tahun 2016 sampai tahun 2022. Penentuan tahun dalam penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh pada laporan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linear berganda dan menggunakan data panel. Berdasarkan pada latar belakang yang dituliskan pada diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada**

**Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2016-2022.**

B. Rumusan Masalah

Dengan topik latar belakang mengenai kesejahteraan Masyarakat dilihat dari IPM dan beberapa faktor pembangunnya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pasda latar belakang terkait kesejahteraan Masyarakat yamh dilihat dari IPM juga faktor-faktor pembangunnya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, maka dapat

diambil beberapa rumusan masalah. Dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk dan menganalisis:

1. Pengaruh pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini juga diharapkan membawa berbagai manfaat. Adapun manfaat yang akan diperoleh yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharap mampu memaparkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan keilmuan serta bermanfaat sebagai pengembang pengetahuan pada ilmu ekonomi.

2. Secara Praktis

- a. Pemerintahan Daerah

Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Yogyakarta terkhusus pada bagian manajemen diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat membantu dalam menambah referensi pemikiran untuk menentukan keputusan yang mampu menunjang kinerja di dinas pemerintah.

b. Pihak Akademik

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat serta ikut didalam menambahkan referensi ilmu pengetahuan terkait ilmu ekonomi terkhusus mengenai Pendapatan Asli Daerah juga semua bidang yang berhubungan dengan ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, serta penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

c. Untuk peneliti selanjutnya

Untuk peneliti yang akan datang diharapkan penelitian ini bisa diambil sebagai sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian dengan tema yang sama, sehingga ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia dapat diikuti perkembangannya.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu penelitian, supaya hasilnya dapat dengan mudah dipahami, maka memerlukan sistematika penulisan yang baik dan benar.

Sehingga akan tercapai berbagai manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan, yang berisikan bahasan mengenai latar belakang dengan dukungan teori yang ada. Pada penelitian ini memaparkan situasi awal mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Dari latar belakang yang telah dijabarkan maka akan menghasilkan beberapa rumusan masalah. Dan akan menghasilkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisikan bahasan teori yang ada, definisi, dan juga konsep relevan yang memiliki hubungan terkait pembahasan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yang berisikan bahasan mengenai jenis penelitian, data dan teknik perolehannya, juga populasi serta sampel, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang dipakai.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang berisikan penjelasan mengenai hasil pengolahan data sebagaimana teknik analisis yang digunakan.

Bab V Penutup, yang berisikan bahasan mengenai kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang didapatkan dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, pengujian dan dari uraian pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY maka diperoleh kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada periode tahun 2016 sampai tahun 2022. Dengan nilai t hitung $>$ t tabel, yaitu $13,605 > 1,690$. Dan nilai signifikansi PAD sebesar $0,000$, dimana $0,000 < 0,05$ Hasilnya bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta. Hasil tersebut mengartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah akan berdampak baik pada peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada periode tahun 2016 sampai tahun 2022. Dengan nilai t hitung yaitu $-4,199$, dimana $-4,199 < 1,690$, tetapi hitung untuk DAU yaitu -4199 berada di daerah penolakan H_0 . Maka tetap memiliki pengaruh, dengan arah

pengaruh negatif. Dan memiliki signifikansi 0,000, dimana $0,000 < 0,05$. Hasil ini sejalan dengan konsep *Fiscal Gap*, yang mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dari kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dengan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Yang berarti, bahwa daerah yang *fiscal capacity*-nya lebih besar dari *fiscal needs* hitungan DAU-nya akan negatif.

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada periode tahun 2016 sampai tahun 2022. Dengan nilai t hitung variabel DAK adalah -1,313, dimana $-1,313 < 1,690$. Nilai signifikansi DAK sebesar 0,199, dimana $0,199 > 0,05$. Dan dilihat dari kurva hipotesis, berada di luar penolakan H_0 yaitu berada pada daerah H_0 diterima. Hasil tersebut mengartikan bahwa besar kecilnya penerimaan Dana Alokasi Khusus dari APBN tidak mempengaruhi peningkatan Kesejahteraan masyarakat. Hasil ini dikarenakan sektor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui IPM ialah sektor perdagangan, tenaga kerja dan industri. Sedangkan Sektor-sektor pengalokasian DAK memiliki pengaruh langsung relatif kecil terhadap peningkatan IPM.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dapat dilihat pada nilai adjusted R square adalah 0,866. bahwa variabel PAD, DAU, DAK, secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 86,6%. Terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan

sisanya atau 13,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat variabel Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Dari hasil tersebut mengartikan pentingnya pemerintah daerah untuk terus menjaga peningkatan pendapatan daerah terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Karena Kesejahteraan Masyarakat akan membaik seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak jumlah hasil Pendapatan Asli Daerah maka daerah akan mampu memaksimalkan penunangan sektor kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kemampuan suatu daerah dalam mengelola kekayaan daerah diharapkan terlaksana secara optimal agar mampu mencukupi segala aspek kebutuhan pada masyarakat seperti pelayanan kesehatan masyarakat, pendapatan masyarakat, juga pendidikannya yang mana segala aspek tersebut dapat mempercepat pembangunan masyarakat yang baik dalam usaha pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti dengan menyertakan realisasi pengalokasian DAU dan DAK pada setiap sektornya. Sehingga akan lebih jelas sektor mana saja yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. A. N., & Setiawati, E. (2023). The Effect of Genuine Revenue, General Allocation Funds And Special Allocation Funds on the Human Development Index. *The International Journal of Business Management and Technology*, 7(2), 53–59.
- Astuti, I. A. P., & Astika, I. B. P. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2416–2446.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta 2022. *Badan Pusat Statistik*, 73, 3.
- Basri, I. A. (2009). *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Gema Insani Pers.
- BPS Kabupaten Humbang Hasundutan. (2018). IPM Kabupaten Humbang Hasundutan 2018. In *CV. Sinarta*. BPS Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Budihardjo, A., Arianti, F., & Mas'ud, F. (2020). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap PDRB. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 1–9. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Firdaus, M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh. In *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (Vol. 53, Issue 9). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

- Fitriya, N. M., & Witono, B. (2023). The Influence of Regional Original Income , General Allocation Funds , and Special Allocation Funds on the Human Development Index (Conduct Research on Java Island Regencies and Cities During 2019 to 2021). *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, 06(01), 176–181.
- Ghazali, I. (2006). *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Universitas Diponegoro.
- Gumanti, M., Fauzi, F., & Jatiningrum, C. (2022). The Analysis of Regional Income on Economic Growth Lampung Province. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 5(6), 1036–1046. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i6.2010>
- Halim, A. (2004a). *Akuntansi sektor publik-akuntansi keuangan daerah* (Ed. rev.). Salemba Empat.
- Halim, A. (2004b). *Manajemen keuangan daerah* (Ed.1). Bunga Ramapi.
- Harahap, R. U. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Hasan, M. A., & Agung, M. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Riau Periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 190–203.

- Karyadi, S. A. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota DI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012* [Universitas Negeri Yogyakarta].
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3347>
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *AKADEMIKA*, 20(02).
- Kuncara, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam. In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Vol. 4, Issue 1). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Melgiana, A. C., Rupa, I. W., & Riasning, N. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 45–49.
<https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1543.45-49>
- Mujiwardhani, A., Setiawan, L., & Nawawi, A. (2022). *Dana Alokasi Khusus di Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Tahun.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1), 67.
<https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>

- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. In *Perpustakaan Unnes* (Vol. 2, Issue 1). Universitas Negri Semarang.
- Nugraheni, A. (2022). Kesejahteraan Indonesia di Antara Negara Dunia. *Kompas*, 1. <https://app.komp.as/kNpzeg9Eefz1mJ6D9>
- Purba, R., & Ginting, R. M. H. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi, 1 No 1*(1), 25–31.
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi, 11*(3), 863–877.
- Rineldis, A. k., & Bediona, A. subarjo. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Upah Minimum. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi, 11*(11), 1–23.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1*(1), 1–17.
- Rohmah, N. H. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada PEMDA Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015. *Simki-Economic, 01*(11), 1–14.

- Rosita, I. A. P. M., & Sutrisna, I. K. (2018). Pengaruh. Pendapatan Asli. Daerah Dan Dana. Perimbangan Terhadap. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan. Masyarakat Pada. Kabupaten/Kota Di. Provinsi Bali. *Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(1), 1445–1471.
- Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 2409–2438.
- Sasana, H. (2011). Analysis Determinants in Regional Shopping District / City West Java Province In Era Autonomy and Fiscal Decentralization. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 46–58.
- Sembiring, E. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition Journal)*, 1(2), 160–170.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2008). Indeks Pembangunan Manusia Manusia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26, 9(1), 18–26.
- Sinaga, D. (2014). *Ajar Statistik Dasar* (Aliwar (ed.); 1st ed.). UKI PRESS.
- Subdirektorat Analisis Statistik. (2015). Indeks Pembangunan Manusia 2014 (Metode Baru). In *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik.
- Suganda, A. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2012-2016. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 91(5), 1–58. <https://openknowledgemaps.org/>

- Suhandana, L. A. (2020). *Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh* (Vol. 21, Issue 1). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Rafika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2008). *Belajar Mudah SPSS untuk Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Umum*. Ardana Media.
- Takhim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10(2), 436–451.
- Undang-Undang. (2004). Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah. In *Republik Indonesia*. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(10), 2195–2225.
- Wijayanti, N. K. H., & Darsana, I. B. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal EP Unud*, 4(9), 1164–1193.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2044–2070.
- Wirawan, N. (2002). *Cara Mudah Memahami Statistik 2 (Statistik Inferensia) Untuk ekonomi dan Bisnis* (Edisi kedua). Penerbit Keraras Emas.

Wulandari, A. S. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bulukumba. In *Universitas Muhammadiyah Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Yani, A. (2002). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia* (Edisi revi). Raja Grafindo Persada.

